

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hari jumat 25 Januari 2019, Institut Akuntan Publik (IAPI) mengalami kelangkaan jumlah akuntan publik dan dengan perkembangan sektor usaha di Indonesia ini maka IAPI mengharapkan banyaknya akuntan publik sebagai bentuk tindakan pencegahan kalau-kalau terjadi kekurangan akuntan publik. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Umum IAPI dengan membandingkan jumlah perusahaan di Indonesia yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunannya ke kantor pajak ada 700.000 perusahaan dan yang memakai jasa akuntan publik cuma 30.000 perusahaan. Berbeda jauh dengan jumlah perusahaan yang memakai jasa akuntan publik ada 62.000 perusahaan dari total 680.000 perusahaan. Data perusahaan yang memakai jasa akuntan publik ini sangat berguna untuk perbankan memahami kepantasan kredit modal kerja perusahaan sehingga dapat terbebas dari kredit bermasalah dan data ini bisa digunakan untuk menghindari praktek korupsi yang dilakukan perusahaan. Data-data ini juga dibutuhkan oleh lembaga-lembaga dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diantara lain perusahaan *multifinance* , perusahaan asuransi dan lain lain, ungkap Ketua Umum IAPI ini (Antara/lav).

Untuk menjadi akuntan, seseorang harus mendapatkan izin untuk melakukan pelaksanaan tugas akuntan publik dari Menteri Keuangan atau pejabat berwenang yang lain (Agoes, 2017:71). Pemeriksaan umum atas laporan keuangan suatu perusahaan dan melakukan prosedur audit yang sesuai lalu memberikan suatu pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan adalah fungsi utama seorang

akuntan publik. Pemeriksaan yang dilakukan seorang akuntan publik independen sangat diperlukan meskipun divisi akuntansi pada suatu perusahaan memiliki keahlian dan kemampuan dalam pengetahuan dan penerapan akuntansi yang baik, divisi akuntansi kedudukannya berada di bawah manajemen perusahaan sehingga berlandaskan pandangan pihak dari luar manajemen seorang akuntan perusahaan tidaklah independen (Agoes & Ardana, 2014:154). Sejalan dengan fenomena yang dijabarkan di awal, proses untuk mencapai profesi Akuntan Publik sendiri membutuhkan proses yang tidak sebentar. Hingga 31 Desember 2015, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam mendapatkan gelar akuntan yaitu orang yang telah menyelesaikan studi ekonomi jurusan akuntansi pada universitas swasta atau negeri dan menempuh 20-30 SKS Pendidikan Profesi Akuntan di Perguruan Tinggi tertentu. Orang-orang yang telah mendapat hak untuk menggunakan gelar akuntan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor register dari Departemen Keuangan. Ada juga ketentuan lain dari Departemen Keuangan untuk mendapatkan izin praktik akuntan publik yaitu telah menempuh 4000 jam kerja di KAP setara dengan 3 tahun kerja, memiliki kantor mendukung praktik, memiliki beberapa staff dan lain-lain (Agoes, 2017:17).

Bukan hanya proses yang panjang tetapi masih banyak juga kasus-kasus kecurangan yang melibatkan Akuntan Publik itu sendiri. Berlandaskan pada pertimbangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di tahun 2002, Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia memberikan hukuman kepada sepuluh (10) kantor Akuntan Publik. 10 kantor akuntan publik tersebut di duga menjalankan pelanggaran berat ketika melakukan pemeriksaan pada laporan keuangan bank yang menerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di tahun

1998. Ada juga seorang akuntan publik bernama Ludovicus Sensi Wanbio yang bekerja di kantor akuntan publik besar di Indonesia terkena hukuman Rp 100.000.000,- karena di duga lalai dalam menjalankan pemeriksaan laporan keuangan PT. Kimia Farma pada tahun 1998. Di Amerika Serikat tahun 2003, *United States Securities Exchange Commisson (US-SEC)* melakukan penolakan laporan keuangan pada salah satu perusahaan telekomunikasi besar di Indonesia dikarenakan tidak terdaftarnya kantor Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan perusahaan telekomunikasi tersebut di US-SEC (Purba, 2011:13).

Persepsi merupakan sebuah tahap dimana seorang manusia mengontrol dan menafsirkan citra sensoris mereka untuk meneruskan makna bagi lingkungannya (Robbins & Judge, 2013:166). Mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan Sarjana Akuntansi merupakan seorang calon akuntan publik, sehingga persepsi para mahasiswa dibutuhkan untuk melihat bagaimana pemahaman mereka tentang lingkungan akuntan publik. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Yuni Ekawarti menunjukkan sebagian mahasiswa akuntansi di Universitas Tridianti Palembang tidak berminat menjadi akuntan publik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis terdorong untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai perbedaan hasil persepsi mahasiswa akuntansi terhadap lingkungan kerja akuntan publik berdasarkan jenis kelamin atau *gender*.

Berlandaskan beberapa penjelasan di atas, penulis merasa semakin tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul skripsi: **“PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP LINGKUNGAN KERJA AKUNTAN PUBLIK BERDASARKAN GENDER DI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA”**.

1.2 Rumusan masalah

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap lingkungan kerja Akuntan Publik berdasarkan *gender* di Universitas Kristen Maranatha?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap lingkungan kerja Akuntan Publik berdasarkan *gender* di Universitas Kristen Maranatha.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas Kristen Maranatha

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah tambahan Pustaka dan dapat menjadi tanda mata yang baik bagi kampus tercinta.

2. Bagi Mahasiswa

Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan wawasan yang lebih tentang Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Lingkungan Kerja Akuntan Publik dan sebagai referensi untuk mahasiswa/i selanjutnya yang mungkin akan mengambil penelitian lebih mendalam dalam topik ini.

3. Bagi Penulis

Penulis dapat menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang di dapat dari Dosen-dosen Akuntansi Universitas Kristen Maranatha pada penelitian ini.